

# Village Food Security Management Through Community Participation in Ngampelsari: Pengelolaan Keamanan Pangan Desa Melalui Partisipasi Masyarakat di Ngampelsari

*Fitriah Eka Lestari*  
*Isnaini Rodiyah*

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

General Background: Food security is a key pillar of sustainable development in Indonesia, supported by national and village-level initiatives. Specific Background: Ngampelsari Village implemented food security programs funded by the Village Fund focusing on aquaculture, livestock, and hydroponic agriculture. Knowledge Gap: However, the program's effectiveness and long-term sustainability have not been systematically evaluated. Aims: This study analyzes the effectiveness of food security implementation in achieving sustainable community welfare. Results: The findings reveal that while community participation and funding allocation were strong, program outcomes remained suboptimal due to limited technical capacity, poor infrastructure, and low production results. Novelty: The study offers a comprehensive evaluation model combining quantitative field data with qualitative stakeholder analysis to measure local food program performance. Implications: Strengthening technical training, infrastructure, and continuous monitoring is required to improve the effectiveness and sustainability of food security initiatives.

## Highlights:

- Program funded by Village Fund but limited in results.
- Human resource and infrastructure issues persist.
- Technical training and evaluation are needed.

**Keywords:** Food Security, Community Participation, Village Fund, Sustainability, Ngampelsari

## **Pendahuluan**

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan setiap individu memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau. Ketahanan pangan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang diproduksi secara lokal, tetapi juga oleh faktor ekonomi, sosial, dan distribusi pangan yang seringkali tidak merata antara daerah satu dengan lainnya. Meskipun Indonesia memiliki sektor pertanian yang besar, berbagai tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga pangan global, serta ketergantungan pada impor komoditas tertentu, turut memengaruhi kestabilan pangan di negara ini. Masalah ketahanan pangan di Indonesia juga terkait erat dengan aspek pemanfaatan pangan yang mencakup pola makan sehat dan status gizi masyarakat. Meskipun pangan tersedia, masih terdapat masalah gizi seperti malnutrisi, kekurangan gizi pada anak-anak, serta obesitas pada kelompok dewasa. Oleh karena itu, untuk mencapai ketahanan pangan yang sejati, Indonesia perlu menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan kebijakan yang tepat dan pengelolaan yang lebih efisien di seluruh aspek ketahanan pangan: ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pasal 1 ayat 4 menyatakan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan dari tingkat negara hingga individu. Hal ini tercermin dari ketersediaan pangan yang mencukupi, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, yang aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta sesuai dengan nilai-nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, guna mendukung kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.[1] Ketahanan pangan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, namun juga ada peluang untuk memperkuatnya. Pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam, teknologi pertanian, serta kebijakan yang berpihak pada ketahanan pangan dapat membantu menciptakan sistem pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan peran aktif pemerintah, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan.

Program ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 [2]. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 terkait Pengelolaan Dana Desa Pasal 34 ayat (2), Pemerintah Desa diharuskan untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani yang disesuaikan dengan karakteristik serta potensi desa [3]. Sebagai panduan desa diterbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 tahun 2021 mengenai prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 [4], Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 tahun 2022 mengenai prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023 [5] serta Keputusan Menteri Desa Nomor 82 Tahun 2022 mengenai Pedoman Ketahanan Pangan di Desa [6]. Salah satu prioritas dalam penggunaan Dana Desa adalah untuk ketahanan pangan dengan alokasi minimum sebesar 20 persen dari total anggaran yang diterima desa. Melalui kebijakan ini diharapkan Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan potensi desanya termasuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan, pembangunan lumbung pangan desa, pengolahan pascapanen, serta penguatan ketahanan pangan lainnya yang sejalan dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Di Kabupaten Sidoarjo, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi industri dan sektor pertanian yang cukup besar, ketahanan pangan memiliki peranan vital dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Sidoarjo telah mengalami perkembangan pesat dalam sektor industri dan urbanisasi, sektor pertanian tetap menjadi penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat di wilayah pedesaan [7]. Oleh karena itu, keberlanjutan dan ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, dan merata di tingkat desa menjadi sangat penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat [8]. Namun, ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks, baik dari faktor eksternal seperti perubahan iklim dan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, maupun dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia rendahnya partisipasi masyarakat, infrastruktur yang kurang mendukung serta kesenjangan antara program yang dirancang dengan kondisi nyata di lapangan. Di sisi lain, sektor industri yang berkembang pesat di daerah ini memiliki dampak ganda terhadap ketahanan pangan. Di satu sisi, industri pangan lokal dapat memberikan nilai tambah pada produk pertanian, tetapi di sisi lain, urbanisasi yang pesat mengurangi luas lahan pertanian yang tersedia. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam hal akses pasar bagi petani dan keterbatasan dalam adopsi teknologi pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengimplementasikan sejumlah program untuk meningkatkan ketahanan pangan, termasuk program pemberdayaan petani, penyuluhan pertanian, serta diversifikasi produk pangan lokal.

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan besar dalam hal implementasi dan distribusi bantuan, serta ketidakmerataan dampak program di antara kelompok masyarakat yang berbeda.

Salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan program ketahanan pangan adalah Desa Ngampelsari, program berjalan sejak tahun 2022. Ketika itu, pemerintah pusat meluncurkan inisiatif ketahanan pangan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi pasca munculnya wabah Covid 19 yang berdampak negatif terhadap perekonomian di Indonesia. Desa Ngampelsari juga sangat merasakan dampak adanya wabah Covid 19, tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga memengaruhi ekonomi, sosial, pendidikan, ketahanan pangan, dan lingkungan. Dimana banyak pekerja yang diberhentikan secara paksa sehingga mereka kehilangan pekerjaan dan mengandalkan bantuan pangan dari pemerintah dan lembaga kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di Desa Ngampelsari pada tahun 2022 telah menganggarkan Rp. 84.438.920 untuk kegiatan program ketahanan pangan di bidang Perikanan. Karena sebagian besar penduduk Desa Ngampelsari adalah pekerja, ketersediaan lahan pertanian sudah tinggal sedikit bahkan hampir tidak ada dan itu pun sudah tidak produktif. Maka, dalam program ketahanan pangan ini Pemerintah Desa Ngampelsari berfokus pada bidang perikanan yaitu budidaya ikan lele dengan media kolam terpal. Untuk melaksanakan program ketahanan pangan tersebut Pemerintah Desa Ngampelsari melalui Musyawarah Desa membentuk 2 kelompok masyarakat (Pokmas), masing-masing kelompok masyarakat (Pokmas) beranggotakan 7 orang yang terdiri dari unsur masyarakat, Lembaga Desa, dan orang visioner dengan keterlibatan unsur perempuan yang memiliki kapasitas berinovasi. Kelompok masyarakat (Pokmas) tersebut mempunyai tugas untuk mengelola kegiatan ketahanan pangan yang berupa budidaya ikan lele dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan budidaya ikan lele. Disamping mendapatkan bantuan bibit dan sarana prasarana budidaya ikan lele, Pokmas yang dibentuk juga mendapat pelatihan tentang cara budidaya ikan lele. Selain itu juga ada kegiatan pelatihan pengolahan makanan berbahan dasar ikan yang di ikuti oleh 50 orang peserta dari masyarakat Desa Ngampelsari. Kegiatan pelatihan pengolahan makanan berbahan dasar ikan yang diadakan di Desa Ngampelsari memberikan sejumlah manfaat positif bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan budidaya lele. Pelatihan ini membantu masyarakat mengembangkan keterampilan dalam mengolah ikan lele menjadi produk makanan yang bernilai tambah, yang dapat meningkatkan variasi konsumsi serta memberikan peluang ekonomi. Dengan harapan setelah mengikuti pelatihan tersebut masyarakat bisa menciptakan usaha baru terkait dengan olahan makanan sehat dan bergizi, serta dapat memulihkan perekonomian masyarakat pasca wabah covid 19.

Pada tahun 2023, Pemerintah Desa Ngampelsari melaksanakan 6 kegiatan program ketahanan pangan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 191.100.000. Kegiatan program ketahanan pangan tersebut antara lain adalah 1) Di bidang perikanan yaitu budidaya ikan lele media kolam terpal dengan membentuk 1 Pokmas baru untuk mendapatkan bantuan bibit dan sarana prasarana budidaya ikan lele. Untuk Pokmas yang di bentuk pada tahun 2022 masih dijalankan dan beberapa kali panen. 2) Budidaya ikan nila, kegiatan ini membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Selain untuk konsumsi pribadi, ikan nila juga dapat dipasarkan, memberikan pendapatan tambahan bagi keluarga petani. Budidaya ikan nila ini dilaksanakan dengan sistem kolam tradisional yang sangat bergantung pada pasokan air yang cukup dan stabil untuk keberlangsungan hidup ikan. Satu Pokmas yang dibentuk untuk menerima bantuan bibit dan sarana prasarana budidaya ikan nila. 3) Di bidang peternakan Desa Ngampelsari berfokus pada program pengelolaan hewan ternak dengan sistem penggemukan sapi dengan 1 Pokmas untuk menerima bantuan hewan ternak sebanyak 3 ekor sapi. 4) Program pengelolaan hewan ternak dengan sistem penggemukan kambing dengan 1 Pokmas untuk menerima bantuan hewan ternak sebanyak 25 ekor kambing betina. Kelompok Masyarakat (Pokmas) ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ternak yang dipelihara tetap sehat, penyediaan pakan yang berkualitas untuk ternak, baik berupa pakan hijauan maupun pakan tambahan yang dapat mempercepat proses penggemukan. Melalui program ini, Pokmas berusaha meningkatkan pendapatan anggota melalui penggemukan sapi dan kambing serta pemasaran produk ternak dalam bentuk sapi dan kambing yang siap potong. Dengan sistem pemasaran yang terkoordinasi, mereka bisa mendapatkan harga yang lebih baik dan menjual hasil ternak kepada pasar lokal atau luar desa. 5) Pengelolaan Tanaman Obat Keluarga (Toga), Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pokja 3 Tim Penggerak PKK Desa dilahan milik desa agar dapat dengan mudah menjaga, merawat, dan memanfaatkan tanaman obat tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan lahan kosong untuk budidaya toga dengan menanam berbagai tanaman yang memiliki khasiat menjadi salah satu cara yang dilakukan agar masalah pangan secara tidak langsung akan dapat diatasi setelah hasil toga diolah lebih lanjut sehingga bernilai ekonomis [9]. 6) Kegiatan Pelatihan Pengolahan Makanan Berdaya Jual yang di ikuti oleh 60 orang masyarakat Desa Ngampelsari. Dalam pelatihan itu peserta dibekali dengan keterampilan pengolahan pangan yang dapat dipasarkan secara luas. Dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi produk lokal. Dengan harapan kedepan produk

olahan pangan yang dihasilkan mampu bersaing dipasar lokal maupun lebih luas lagi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui pengembangan usaha kecil berbasis pengolahan pangan.

Selanjutnya di tahun 2024 Desa Ngampelsari telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 194.000.000,- untuk kegiatan ketahanan pangan di bidang pertanian dan peternakan. Pemerintah Desa Ngampelsari menerapkan solusi modern yang efisien dan ramah lingkungan untuk pertanian, terutama di daerah dengan keterbatasan lahan dan air yaitu Tanaman Hidroponik. Dalam program kegiatan budidaya hidroponik ada 8 kelompok masyarakat (Pokmas) untuk menerima bantuan bibit dan media tanam hidroponik masing-masing sebanyak 2 paket. Kelompok masyarakat (Pokmas) tersebut mempunyai tugas untuk mengelola kegiatan ketahanan pangan yang berupa budidaya hidroponik dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan tersebut. Pelatihan budidaya hidroponik di Desa Ngampelsari memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mendukung ketahanan pangan. Dengan mempelajari cara menanam tanaman tanpa tanah, masyarakat dapat menghasilkan pangan secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada pasar luar, dan meningkatkan keberagaman konsumsi pangan. Selain itu, hidroponik memungkinkan pemanfaatan lahan terbatas secara efisien dan menghasilkan produk yang lebih sehat. Kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa, baik untuk konsumsi pribadi maupun dijual, sehingga memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Sedangkan di bidang peternakan pada tahun 2024 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu program pengelolaan hewan ternak dengan sistem penggemukan sapi dan kambing, dengan membentuk 2 Pokmas baru. Pokmas pengelola hewan sapi menerima bantuan hewan ternak sebanyak 4 ekor sapi dan Pokmas pengelola hewan kambing menerima bantuan hewan ternak sebanyak 25 ekor kambing betina. Program ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan desa dengan memperkuat sektor peternakan dan meningkatkan pendapatan peternak melalui peningkatan hasil ternak yang lebih berkualitas. Dibawah ini adalah data program ketahanan pangan di Desa Ngampelsari Kecamatan Candi :

Tabel 1. Data Kelompok Masyarakat (POKMAS) Desa Ngampelsari Tahun 2022 – 2024

N o	Tahun	Pokmas Hewani	Pokmas Nabati	Program Kegiatan
01.	2022	Ploso Abadi	-	Budidaya Lele
02.	2022	Kedinding Mapan	-	Budidaya Lele
03.	2023	Nur Gemilang	-	Budidaya Nila
04.	2023	Girandra	-	Budidaya Lele
05.	2023	Maju Jaya Farm	-	Penggemukan Sapi
06.	2023	Rumah Domba	-	Penggemukan Kambing
07.	2024	-	Dahlia	Budidaya Hidroponik
08.	2024	-	Mawar	Budidaya Hidroponik
09.	2024	-	Hijau Sayurku	Budidaya Hidroponik
10.	2024	-	Jeruk	Budidaya Hidroponik
11.	2024	-	Candiloka Hijau	Budidaya Hidroponik
12.	2024	-	Tanjung Rosella1	Budidaya Hidroponik
13.	2024	-	Tanjung Stroberi	Budidaya Hidroponik
14.	2024	Amanah Farm	-	Penggemukan Sapi
15.	2024	Lancar Jaya	-	Penggemukan Kambing

Tabel 1 di atas menggambarkan struktur pelibatan kelompok masyarakat (Pokmas) dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Desa Ngampelsari selama tahun 2022 hingga 2024. Terlihat adanya diversifikasi kegiatan dari sektor perikanan, peternakan, hingga pertanian hidroponik, serta semakin meningkatnya jumlah Pokmas dari tahun ke tahun. Data ini menunjukkan komitmen Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan berbasis kelompok. Selain itu, pola distribusi Pokmas antara bidang nabati dan hewani juga mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan sumber pangan dan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal. Namun, untuk memahami sejauh mana pelaksanaan program ini berjalan secara efektif, perlu dilihat pula rincian bentuk kegiatan serta alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh desa. Oleh karena itu, Tabel 2 berikut menyajikan rincian volume kegiatan dan jumlah anggaran yang telah direalisasikan selama periode yang sama. Tabel ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi teknis di lapangan, termasuk jumlah paket kegiatan, hewan ternak yang dibagikan, hingga pelatihan yang dilakukan guna menunjang keberhasilan program ketahanan pangan di Desa Ngampelsari.

Tabel 2. Rincian Kegiatan Ketahanan Pangan di Desa Ngampelsari Tahun 2022 - 2024

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Volume</b>	<b>Pagu Anggaran</b>
0	2022	Budidaya Lele	2 Paket	Rp. 53.796.920
1.				
0	2022	Pelatihan Budidaya Lele	1 Paket	Rp. 4.642.000
2.				
0	2022	Pelatihan Pengolahan Makanan Berbahan Dasar Ikan	1 Paket	Rp. 26.000.000
3.				
0	2023	Budidaya Ikan Nila	1 Paket	Rp. 34.185.000
4.				
0	2023	Budidaya Ikan Lele	1 Paket	Rp. 26.000.000
5.				
0	2023	Pengelolaan Tanaman Toga	1 Paket	Rp. 7.500.000
6.				
0	2023	Bantuan Hewan Ternak Sapi	3 Ekor	Rp. 62.415.000
7.				
0	2023	Bantuan Hewan Ternak Kambing	25 Ekor	Rp. 35.000.000
8.				
0	2023	Pelatihan Pengolahan Makanan Berdaya Jual	1 Paket	Rp. 26.000.000
9.				
1	2024	Budidaya Hidroponik	15 Paket	Rp. 61.475.000
0.				
1	2024	Pelatihan Hidroponik	1 Paket	Rp. 6.135.000
1.				
1	2024	Bantuan Hewan Ternak Sapi	4 Ekor	Rp. 89.600.000
2.				
1	2024	Bantuan Hewan Ternak Kambing	25 Ekor	Rp. 36.790.000
3.				

Sumber: Pemerintah Desa Ngampelsari Kecamatan Candi (2024)

Tabel data diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ngampelsari punya komitmen penuh terhadap program ketahanan pangan dengan berdasarkan pada pemberian dana yang maksimal sesuai dengan kebijakan yaitu sebesar 20 persen dari total anggaran yang diterima Desa. Meskipun program ketahanan pangan telah dilaksanakan namun masih jauh dari pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti memastikan ketersediaan pangan yang bersumber dari hasil produksi masyarakat desa, serta menciptakan lumbung pangan desa yang dapat mendukung ketahanan pangan ditingkat lokal. Namun pada implementasi program dilapangan cenderung terbatas pada pemberian modal kepada Pokmas dan modal tersebut diputar untuk pembelian bibit kembali tanpa adanya tindak lanjut yang jelas untuk meningkatkan produktivitas maupun pengembangan hasil budidayanya. Hal tersebut terlihat pada permasalahan yang ada disektor perikanan yaitu pertama adalah kekurangan sumber air, karena air adalah unsur utama dalam budidaya ikan nila dan budidaya lele, pada musim kemarau sumber air mengering menyebabkan sulit untuk mendapatkan air yang baik dan juga menyebabkan banyak ikan yang

mati. Ke-dua dikarenakan PH air rendah yang mengakibatkan seringnya ikan terkena penyakit, seperti penyakit jamur kapas dan kumis kriting. Yang ketiga adalah seringnya kehilangan ikan disebabkan karena tempat yang kurang strategis untuk pengawasan yang optimal.

**Tabel 3. Data Pencapaian Hasil Budidaya Lele**

No.	Nama Pokmas	Masa Tanam Lele	Bibit yang disebar	Hasil
01	Ploso Abadi	Desember 2022 – Maret 2023	10.000 ekor	650kg
02	Ploso Abadi	Maret 2023 – Mei 2023	8.000 ekor	762kg
03	Ploso Abadi	Mei 2023 – Juli 2023	8.000 ekor	352kg
04	Ploso Abadi	Juli 2023 – Agustus 2023	10.000 ekor	222kg
05	Ploso Abadi	Agustus 2023	4.000 ekor	29kg
06	Kedinding Mapan	Desember 2022 – Maret 2023	6.000 ekor	260kg

Sumber: Diolah dari Pokmas Ploso Abadi dan Kedinding Mapan (2024)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian hasil budidaya lele belum mencapai hasil yang diharapkan hanya pada periode Maret 2023 hingga Mei 2023 dari benih yang disebar sebanyak 8000 ekor dengan hasil yang didapat sebanyak 762kg. Sedangkan pada periode Agustus 2023 mengalami penurunan hasil yang cukup drastis yaitu dari benih yang disebar sebanyak 4.000 ekor tetapi hasil yang didapat hanya 29kg. Maka dapat dilihat dari data diatas bahwa hasil budidaya lele banyak yang tidak sesuai harapan dikarenakan banyak permasalahan yang terjadi di lapangan. Sehingga efektifitas program pada sektor perikanan kurang maksimal hal ini menyebabkan hasil panen lele semakin menurun bahkan mengalami gagal panen dan Pokmas tidak bisa melakukan pembibitan kembali.

Hasil panen budidaya ikan lele di Desa Ngampelsari diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat, dengan menyediakan pasokan ikan lele segar sebagai bahan dasar makanan sehat dan bergizi. Ikan lele dikenal kaya akan protein, omega-3, dan nutrisi penting lainnya yang dapat mendukung pola makan sehat bagi keluarga di desa ini. Melalui pengelolaan yang baik, hasil panen ikan lele tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga memperkuat perekonomian desa dengan menciptakan peluang usaha baru bagi para petani ikan dan pelaku usaha pangan. Dengan adanya sinergi antara para petani ikan lele, masyarakat, dan usaha makanan sehat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang saling mendukung. Masyarakat Desa Ngampelsari akan memperoleh akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap pangan bergizi, sementara petani ikan lele juga bisa mendapatkan keuntungan yang stabil dari hasil budidayanya. Proses ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong keberlanjutan dalam ketahanan pangan lokal yang sehat dan bermanfaat.

Gap permasalahan yang ada adalah 1) Kurangnya pemahaman program dan tidak terampilnya anggota Pokmas dalam menjalankan program ketahanan pangan budidaya lele sehingga perlu dilakukan pelatihan. Dalam hal pengelolaan air yang kurang tepat, seperti kekurangan sumber air dan PH air yang rendah serta minimnya pengetahuan tentang vitamin dan obat untuk ikan. 2) Desa kesulitan mencari anggota Pokmas yang punya Sumber Daya manusia (SDM) yang tepat dan terampil untuk mengelola kegiatan budidaya lele, sehingga program tidak berjalan optimal. 3) Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Desa Ngampelsari belum mencapai hasil yang di harapkan, baik dari segi produktivitas panen maupun dampak ekonomi terhadap masyarakat. 4) Program ketahanan pangan nabati (Budidaya Hidroponik) masih menghadapi kendala teknis, seperti rendahnya pemahaman anggota Pokmas dalam budidaya, terbatasnya alat pendukung, serta belum tersedianya akses pasar yang jelas untuk hasil panen.

Berdasarkan penelitian dari Ashari (2022), yang berjudul Efektivitas Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Jurnal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan KRPL di KWT Asoka Mandiri Makmur dinilai tidak efektif. Dari keempat indikator tersebut, hanya memenuhi kriteria pemenuhan target. Meskipun kelompok ini dibentuk sebagai Langkah persiapan melaksanakan kegiatan KPRL, namun dari segi sosialisasi masih terkendala dengan kurangnya sosialisasi dalam hal partisipasi anggota dan tentang pengelolaan organisasi. Terkait dengan tujuan program,

terdapat ketidaksesuaian antara tujuan dengan pelaksanaan dilapangan, serta pada aspek pemantauan masih kurang pengawasannya, terutama pada tahap kemandirian [10]. Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Mukhrijal dkk (2023), dalam jurnal yang berjudul Efektivitas Program Ketahanan Pangan di Gampong Keuramat Kota Banda Aceh. Program Ketahanan Pangan seharusnya terus dipertahankan dan dilaksanakan secara berkelanjutan karena peran penting pangan dalam kehidupan manusia dan kemajuan suatu negara. Program ini memberikan dampak positif, seperti meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan. Di Gampong Keuramat, pelaksanaan program ini sangat dibutuhkan karena dapat membawa dampak positif jika dijalankan dengan efektif. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena beberapa faktor, seperti kurangnya lahan, perencanaan yang belum matang, kurangnya sosialisasi dari perangkat desa kepada masyarakat, serta kurangnya tanggung jawab dari masyarakat dalam menjalankan program tersebut [11]. Nurjakiah, dkk (2024), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Efektivitas Program Ketahanan Pangan Nabati Dan Hewani Di Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dijelaskan bahwa efektivitas program ketahanan pangan nabati dan hewani masih kurang efektif di Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (studi kasus program bantuan benih padi). (1) Faktor penghambat yaitu: 1. Tidak adanya anggaran untuk sosialisasi, 2. Faktor alam, 3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dan manfaat program dalam jangka panjang. (2) Faktor pendukung 1. Luas lahan pertanian, 2. Jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani, 3. Adanya dukungan atau kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2023 [12].

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu kegiatan, program, atau upaya dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dengan hasil yang memadai dan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam konteks program atau organisasi, efektivitas mengukur kemampuan atau keberhasilan program tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002) [13]. Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan (Julia, 2010: 26). Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan Program Ketahanan Pangan yang ada di Desa Ngampelsari adalah teori efektivitas. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno (2010:125) bahwa efektivitas merupakan indikator keberhasilan suatu organisasi yang pada umumnya diukur melalui konsep efektivitas. Efektivitas program dapat diartikan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang telah ditetapkan yang dapat diukur dengan membandingkan rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai [14]. Berikut adalah beberapa indikator efektivitas program yaitu : 1) Pemahaman Program, Sejauh mana pihak yang terlibat (baik pelaksana maupun penerima manfaat) memahami tujuan, sasaran, dan mekanisme dari program yang dijalankan. 2) Tepat sasaran, menilai apakah program atau kebijakan tersebut ditujukan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan atau yang menjadi target sasaran yang tepat sesuai dengan tujuan program. 3) Tercapainya tujuan, mengukur apakah tujuan yang ditetapkan dalam program atau kebijakan tersebut berhasil tercapai dengan cara yang efektif. Ketiga indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas suatu program atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, baik dalam aspek waktu, sasaran, maupun dampak yang dihasilkan. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis Efektivitas Program Ketahanan Pangan yang dilaksanakan di Desa Ngampelsari agar program dapat lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Ngampelsari.

## **Metode**

Metode yang diterapkan dalam tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan deskriptif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell, J, (1998:24), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menyajikan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui teknik statistik atau pengukuran. Sasaran penelitian kualitatif adalah cara untuk memahami data yang dihasilkan dari survei lapangan [15]. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif agar peneliti bisa menganalisis dan menggambarkan fenomena yang teramati dalam studi ini, sehingga dapat menarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Lokasi penelitian ini adalah Pemerintah Desa Ngampelsari Kecamatan Candi, sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang didapat langsung dari sumbernya, dimana pencatatan dan pengamatan dilakukan melalui metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung, dengan sumber data sekunder yang dapat berasal dari jurnal atau media berita. Teknik purposive sampling digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber informasi data berdasarkan aspek-aspek tertentu. Sekretaris Desa, Kasie Pemerintahan / Pelaksana Kegiatan dan Ketua Kelompok Masyarakat menjadi informan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2016:274)

Teknik pengumpulan data bisa diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi [16]. Sumber data dalam penelitian ini melibatkan data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan pendekatan analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1994:12), yang terdiri dari Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan [17]. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua, Reduksi Data adalah proses selektif yang berfokus pada penyerderhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan tertulis untuk menyatukan informasi penting dan mengeliminasi informasi yang tidak relevan. Ketiga, Penyajian Data merupakan kombinasi informasi yang dikumpulkan dilapangan dalam format yang konsisten dan lebih mudah di akses. Hal ini akan memudahkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan mempermudah penilaian secara keseluruhan. Keempat, Penarikan Kesimpulan adalah mengumpulkan semua data berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

Efektivitas program ketahanan pangan di Desa Ngampelsari dianalisis menggunakan tiga indikator menurut teori Edy Sutrisno (2010), yaitu: pemahaman program, tepat sasaran, dan tercapainya tujuan. Ketiga indikator ini digunakan untuk menentukan seberapa berhasil program dan berdampak nyata pada masyarakat desa. Berikut uraian mendalam dari masing-masing indikator:

### 1. Pemahaman Program

Pemahaman program adalah sejauh mana pelaksana dan penerima manfaat mengetahui serta memahami maksud, tujuan, proses dan manfaat dari suatu program. Hal ini perlu dilakukan oleh para pelaksana program agar dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Dalam konteks Efektivitas Program Ketahanan Pangan di Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pemahaman program merupakan aspek yang pertama, dimana indikator ini mencakup pemahaman teknis seperti budidaya ikan dan hidroponik, pemeliharaan ternak, hingga pengelolaan kelompok dan kontribusinya terhadap ketahanan pangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman program masih tidak merata. Beberapa Pokmas, memahami tujuan program, proses budidaya, dan manfaat yang ingin dicapai, namun tidak semua Pokmas memiliki pemahaman yang sama. Minimnya pelatihan lanjutan dan pendampingan teknis menjadi penyebab lemahnya pemahaman tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Luthia Perangkat Desa Ngampelsari selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) :

"Kami sudah melakukan beberapa pelatihan antara lain pelatihan budidaya lele dan nila, serta pelatihan hidroponik, tetapi tidak semua anggota pokmas benar-benar memahami program secara mendalam. Kami menyadari bahwa jumlah pelatihan teknis yang kami lakukan masih terbatas. Oleh karena itu, ini akan menjadi evaluasi kami untuk masa mendatang." (Wawancara, 11 Juni 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan pelatihan, tetapi itu terbatas dari segi jumlah dan kualitas materi. Hal ini menyebabkan pemahaman yang tidak konsisten di antara anggota Pokmas. Kelompok yang terlibat sejak awal pelaksanaan program biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik karena telah menerima pelatihan awal. Sebaliknya, anggota baru yang bergabung pada tahun berikutnya banyak yang belum menerima pelatihan teknis yang memadai. Karena tidak ada keberlanjutan dalam pelatihan, peserta menjalankan kegiatan berdasarkan pengalaman mereka sendiri daripada pedoman teknis yang telah ditentukan. Hal ini pasti berdampak pada kualitas implementasi program di lapangan, yang pada gilirannya berdampak pada pencapaian hasil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, meskipun telah dilakukan upaya pelatihan, program tidak efektif dari segi pemahaman pelaksana karena kurangnya sistem pendampingan yang konsisten dan intensif. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pelatihan di Desa Ngampelsari:



Gambar 1. Pelatihan Budidaya Hidroponik & Pelatihan Budidaya Lele dan Nila  
Sumber: Pemerintah Desa Ngampelsari Kecamatan Candi (2025)

Foto ini menunjukkan Pemerintah Desa Ngampelsari mengadakan pelatihan budidaya hidroponik (27 Oktober 2024) dan pelatihan budidaya lele dan nila (30 November 2022) sebagai bagian dari implementasi program ketahanan pangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman teknis anggota kelompok masyarakat (Pokmas) sehingga mereka dapat menjalankan kegiatan secara mandiri dan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, tidak semua anggota pokmas memiliki kesempatan mengikuti pelatihan secara langsung. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu pelaksanaan, pelatihan lanjutan, dan pendampingan pasca pelatihan yang kurang. Akibatnya, kemampuan teknis anggota Pokmas berbeda. Anggota baru atau tanpa pelatihan sering kali hanya mengandalkan informasi dari sesama anggota, sementara beberapa anggota yang aktif sejak awal lebih memahami dan terampil.

Pelatihan seperti budidaya hidroponik dan budidaya lele-nila merupakan bagian dari strategi peningkatan kapasitas teknis Pokmas. Namun demikian, kegiatan pelatihan ini hanya mencakup sebagian dari total cakupan program ketahanan pangan yang dijalankan di Desa Ngampelsari. Berikut ini tabel program ketahanan pangan selama tiga tahun pelaksanaan:

Tabel 4. Data Program Ketahanan Pangan Desa Ngampelsari Tahun 2022 - 2024

No.	Sektor	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	Prosentase
01	Perikanan	5 Kegiatan	Budidaya Lele, Budidaya Nila, Pelatihan Budidaya Lele dan Nila, Pelatihan Olahan Ikan Lele	38,5%
02	Peternakan	4 Kegiatan	Bantuan Ternak Sapi, Bantuan Ternak Kambing	30,8%
03	Pertanian	3 Kegiatan	Tanaman Toga, Budidaya Hidroponik, Pelatihan Hidroponik	23,1%

Sumber: Pemerintah Desa Ngampelsari Kecamatan Candi (2025)

Berdasarkan data tersebut, Pokmas dituntut untuk memahami berbagai jenis kegiatan di sektor perikanan, peternakan, dan pertanian. Hal ini membutuhkan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan agar pemahaman teknis mereka merata. Keterbatasan jumlah pelatihan dan kurangnya pendampingan menyebabkan adanya kesenjangan pemahaman antar anggota Pokmas, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakmerataan kualitas implementasi program. Salah satu alasan mengapa program tidak berjalan dengan baik di tingkat lapangan adalah kesalahan pemahaman ini. Seperti yang diungkapkan oleh Saudara Pugh Wiyoko selaku anggota Pokmas Ploso Abadi :

“Pada awalnya kami tidak tahu banyak soal teknis budidaya lele ini. Memang ada pelatihan, tapi cuma sekali dan setelah itu kami belajar sendiri dengan aktif bertanya kepada narasumber pelatihan waktu itu. Ketika ada ikan sakit atau kondisi air sudah kotor, kami kesulitan dan bingung harus bagaimana” (Wawancara, 7 Juni 2025)

Dari hasil wawancara diatas, terlihat bahwa pemahaman terhadap teknis budidaya, seperti pengelolaan kualitas air, penanganan penyakit, serta perawatan ikan, masih belum optimal. Salah satu faktor utama yang menyebabkan pemahaman yang buruk ini adalah kurangnya pendampingan yang berkelanjutan dan jumlah pelatihan yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman teknis tidak cukup hanya diperoleh dari pelatihan satu kali, tetapi memerlukan pendampingan berkelanjutan. Selain itu, tidak adanya sistem dokumentasi atau modul yang bisa dijadikan rujukan juga menjadi hambatan bagi anggota dalam mengelola budidaya secara profesional.

Kondisi ini menegaskan bahwa pelatihan yang diberikan, keterbatasan kuantitas, kualitas dan kesinambungan pelatihan menjadi penyebab utama ketimpangan pemahaman dilapangan. Ini berdampak langsung pada kualitas pelaksanaan dan menurunkan efektivitas program secara keseluruhan. Hasil ini mendukung teori Edy Sutrisno (2010) bahwa pemahaman pelaksana tentang isi dan mekanisme kegiatan menentukan efektivitas program. Jika pelaksana tidak memahami program dengan baik, mereka cenderung menjalankannya secara formal atau tanpa niat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Sunarso et al. (2023) di Gampong Keuramat, yang menyatakan bahwa dua faktor yang berkontribusi pada kegagalan program ketahanan pangan adalah pemahaman teknis masyarakat yang buruk dan kekurangan pelatihan yang diberikan pemerintah desa.

## 2. Tepat Sasaran

Indikator tepat sasaran menentukan apakah program telah menysasar kelompok atau individu yang benar-benar sesuai dengan tujuan program dan mampu memenuhi tanggung jawabnya. Jika pelaksana atau penerima manfaat program tidak memiliki kemampuan, keinginan, dan komitmen yang cukup, maka mencapai program yang efektif akan sulit (Edy Sutrisno, 2010).

Dalam program ketahanan pangan, sasaran yang tepat adalah kelompok masyarakat (Pokmas) yang memiliki minat, waktu, dan kemampuan untuk mengelola kegiatan seperti hidroponik, ternak, budidaya ikan, dan pengolahan pangan.

Pemerintah desa telah membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang dianggap mampu menjalankan program ketahanan pangan berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan dokumentasi program. Pokmas terdiri dari unsur masyarakat umum, lembaga desa, tokoh perempuan, dan orang-orang visioner. Langkah ini sudah memenuhi prinsip partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama Bapak Sukiaji, Sekretaris Desa Ngampelsari :

”Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan Pemerintah Desa Ngampelsari membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang terdiri dari unsur masyarakat yang punya kemauan untuk menjalankan program ini. Kami memang mengutamakan partisipasi masyarakat, tapi pada kenyataannya sulit mencari orang yang benar-benar siap. Kadang mereka hanya semangat di awal, tapi kewalahan ditengah jalan” (Wawancara, 11 Juni 2025)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun pendekatan partisipatif telah dilakukan, pelaksanaan di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan. Hal ini dibuktikan melalui dokumentasi Musyawarah Desa berikut:



Gambar 2. Musyawarah Desa Ketahanan Pangan di Desa Ngampelsari  
Sumber: Pemerintah Desa Ngampelsari Kecamatan Candi (2025)

Foto ini menunjukkan pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) Ketahanan Pangan Tahun 2022 di Balai Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Perangkat desa, tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, perwakilan perempuan, dan calon anggota kelompok masyarakat (Pokmas) terlibat dalam kegiatan ini sebagai bagian dari tahapan awal perencanaan program ketahanan pangan desa. Forum ini membahas dan menetapkan proyek utama yang akan didanai Dana Desa, termasuk bidang program seperti perikanan, peternakan, dan pertanian. Musdes ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat terlibat dalam perencanaan pembangunan desa. Ini juga memberikan dasar hukum untuk membentuk Pokmas yang akan mengelola program ketahanan pangan. Mereka menerima bantuan dalam bentuk bibit, sarana prasarana, pelatihan, serta pendampingan teknis. Lebih dari Rp 400 juta rupiah anggaran yang dialokasikan untuk program ini selama tiga tahun. Meskipun demikian, hasil yang dicapai tidak selalu sesuai dengan harapan akibat berbagai kendala di lapangan.

Desa Ngampelsari terletak di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki karakteristik wilayah semi-perkotaan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai pedagang, buruh pabrik, dan hanya sebagian kecil yang bekerja di bidang pertanian dan peternakan. Banyak lahan pertanian di desa ini telah dialihfungsikan menjadi pemukiman atau industri seiring dengan pertumbuhan wilayah, sehingga berdampak pada berkurangnya potensi produksi pangan lokal.

Pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Ngampelsari dimulai pada tahun 2022 dan terus berjalan hingga tahun 2024. Budidaya perikanan (lele dan nila), peternakan (sapi dan kambing), serta pertanian melalui sistem hidroponik adalah fokus dari program ini. Selain itu, pelatihan pengolahan makanan berbasis produk lokal juga merupakan komponen penting dari kegiatan ini. Berikut adalah dokumentasi program ketahanan pangan di Desa Ngampelsari :



Gambar 3. Kegiatan implementasi program ketahanan pangan di Desa Ngampelsari  
Sumber: Pemerintah Desa Ngampelsari Kecamatan Candi (2025)

Dokumentasi program tersebut memperlihatkan implementasi kegiatan ketahanan pangan di berbagai sektor. Di perikanan, ada budidaya lele dan nila. Di peternakan, bantuan ternak sapi dan kambing disalurkan. Di pertanian, fokus pada hidroponik dan tanaman toga. Pelatihan pengolahan makanan juga dilakukan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan desa, meski ada hambatan yang perlu evaluasi.

Selama implementasi, ditemukan bahwa tidak semua anggota Pokmas memiliki latar belakang dan keahlian yang dibutuhkan dalam bidang pertanian, perikanan, atau peternakan. Akibatnya, banyak Pokmas mengalami kesulitan dalam menjaga keberlangsungan budidaya karena lemahnya komitmen, keterbatasan waktu karena pekerjaan utama, dan kurangnya keterampilan teknis. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Nur Aisyah, Ketua Pokmas Hijau Sayurku :

"Pada awalnya anggota Pokmas kami sangat antusias, mereka aktif dalam pelaksanaan budidaya hidroponik. Tapi setelah beberapa bulan ini sudah mulai jarang datang dan bahkan tidak pernah datang lagi karena tidak punya waktu untuk merawat tanaman atau sibuk bekerja. Kami jadi kewalahan mengatur kegiatan karena yang aktif tinggal sedikit." (Wawancara, 12 Juni 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa anggota Pokmas menjadi kurang aktif disebabkan berbagai alasan, seperti kesibukan pekerjaan dan kurangnya komitmen jangka panjang. Hal ini menandakan bahwa proses rekrutmen anggota Pokmas belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan waktu dan konsistensi calon pelaksana program. Dampaknya adalah beban kerja yang tidak merata dan kegiatan kelompok masih menjadi masalah yang mempengaruhi keberlanjutan program.

Meskipun mereka telah terdaftar dan menerima pelatihan, hampir setengah dari anggota Pokmas tidak terlibat secara aktif dalam program, seperti yang ditunjukkan pada hasil wawancara di atas. Rendahnya aktivitas ini menunjukkan bahwa proses pemilihan sasaran belum mempertimbangkan kesiapan, waktu luang, dan motivasi pribadi secara menyeluruh. Ada beberapa anggota yang berpartisipasi karena ajakan atau dorongan bantuan, bukan karena kesadaran untuk membangun ketahanan pangan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Edy Sutrisno (2010) bahwa efektivitas tidak hanya tergantung pada jumlah sumber daya, tetapi juga pada ketepatan sasaran penerima manfaat. Penelitian Ashari (2022) tentang KRPL di Lampung juga menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran menyebabkan kelompok hanya aktif di awal, lalu pasif setelah pendampingan berakhir. Dengan demikian, meskipun masyarakat telah dilibatkan sejak tahap perencanaan, proses rekrutmen anggota Pokmas perlu diperbaiki agar program benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.

### 3. Tercapainya Tujuan

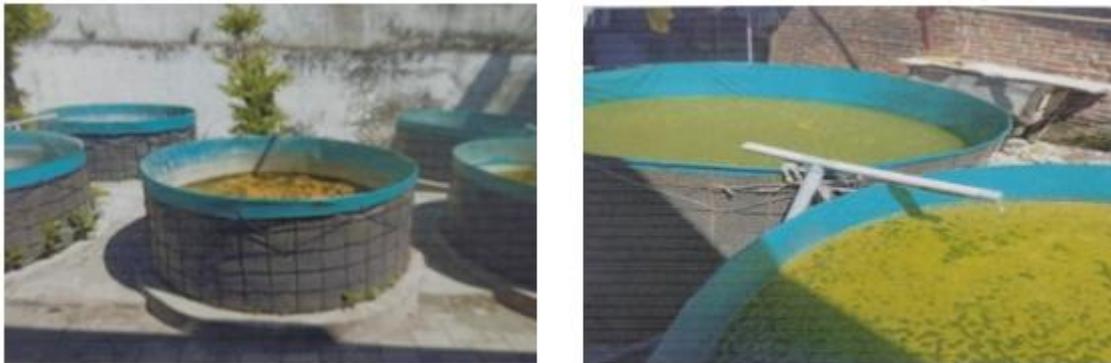
Indikator tercapainya tujuan adalah komponen penting dalam menilai efektivitas suatu program atau kebijakan. Secara umum, indikator ini mengacu pada seberapa jauh hasil yang diperoleh sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan selama tahap perencanaan. Edy Sutrisno (2010) menyatakan bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari proses perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga dari hasil yang dapat dirasakan. Baik secara kuantitatif seperti peningkatan produksi, jumlah peserta aktif, dan pendapatan, maupun secara kualitatif seperti perubahan perilaku, kemandirian kelompok, atau peningkatan kesejahteraan. Jika suatu program berjalan sesuai rencana tetapi tidak memiliki dampak yang nyata, itu tidak efektif karena tidak mencapai perubahan yang diinginkan.

Dalam konteks program ketahanan pangan di Desa Ngampelsari tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan ketersediaan pangan lokal yang mandiri, dan mendorong ide-ide bisnis yang berbasis potensi desa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan program tersebut belum tercapai secara optimal. Beberapa indikator keberhasilan, seperti kemandirian kelompok, peningkatan produksi pangan, dan peningkatan ekonomi lokal, belum berkembang atau bahkan tidak ada perubahan.

Data hasil budidaya lele menunjukkan variasi yang signifikan dari waktu ke waktu. Dalam beberapa masa tanam, hasil panen sangat rendah atau bahkan mengalami gagal panen. Salah satunya terjadi pada Agustus 2023, ketika Pokmas Ploso Abadi hanya berhasil memanen 29 kg lele dari 4.000 bibit. Masalah teknis seperti penyakit ikan, kualitas air yang buruk, dan lokasi kolam yang tidak sesuai menjadi penyebab utama rendahnya produktivitas. Anggota Pokmas Ploso Abadi Saudara Puguh Wiyoko menyampaikan :

“Letak kolamnya kurang strategis jadi tidak bisa mengawasi secara optimal sehingga ikannya sering hilang di ambil orang dan jumlah ikan yang ada dikolam tiap hari berkurang. Waktu Agustus 2023 kami cuma panen sedikit, padahal bibitnya banyak.” (Wawancara, 7 Juni 2025)

Pernyataan tersebut memperkuat bahwa faktor eksternal seperti keamanan lokasi dan rendahnya pengawasan teknis juga turut menyebabkan tidak tercapainya target panen. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya menghadapi kendala teknis internal, tetapi juga persoalan manajerial yang memengaruhi keberhasilan output. Berikut adalah foto kondisi kolam lele Pokmas Ploso Abadi dan Kedinding Mapan :



Gambar 4. Kondisi Kolam Lele Pokmas Ploso Abadi dan Pokmas Kedinding Mapan  
Sumber: Pemerintah Desa Ngampelsari Kecamatan Candi (2025)

Pada gambar pertama menunjukkan kolam yang digunakan oleh Pokmas Ploso Abadi berada di area terbuka, tanpa sistem pengamanan. Kondisi seperti ini menyebabkan potensi kehilangan ikan akibat pencurian, serta mempersulit pemantauan harian terhadap kualitas air dan kondisi ikan. Hal ini menjadi faktor signifikan terhadap rendahnya hasil panen. Gambar kedua adalah kolam lele milik Pokmas Kedinding Mapan tampak berisi air yang keruh berwarna kehijauan. Warna tersebut menandakan tingginya kadar alga dan limbah organik, yang dapat menyebabkan ikan mudah terserang penyakit dan stres. Kurangnya sirkulasi air serta tidak adanya alat pengukur kualitas air menyebabkan pertumbuhan ikan tidak optimal dan berdampak pada rendahnya produktivitas. Berikut adalah hasil panen budidaya lele :

Tabel 5. Data Hasil Panen Lele Pokmas Ploso Abadi dan Kedinding Mapan

Bulan	Pokmas	Jumlah Bibit Ditebar	Hasil Panen (kg)	Keterangan
Maret 2023	Ploso Abadi	10.000	650	Panen optimal
Juli 2023	Ploso Abadi	8.000	350	Penurunan hasil
Agustus 2023	Ploso Abadi	4.000	29	Gagal panen
Maret 2023	Kedinding Mapan	6.000	260	Hasil sedang

Sumber: Diolah dari Pokmas Ploso Abadi dan Kedinding Mapan (2025)

Data di atas menunjukkan bahwa pencapaian hasil budidaya sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis dan manajerial. Program belum mampu menciptakan sumber pangan lokal yang stabil dan berkelanjutan. Hasil panen tidak mencapai target karena masalah seperti kualitas air yang buruk, lokasi kolam yang tidak aman, pencurian, dan kurangnya pengawasan teknis.

Selain itu, masalah tersebut tidak segera diselesaikan karena tidak ada sistem pengawasan berkala dan monitoring yang kurang dari pemerintah desa terhadap kinerja Pokmas. Hal ini tidak hanya menurunkan produktivitas, tetapi juga mengakibatkan rendahnya motivasi anggota kelompok dalam melanjutkan kegiatan. Sementara itu, program budidaya hidroponik yang dilaksanakan pada tahun 2024 masih dalam tahap awal, sehingga dampaknya belum dapat dievaluasi secara menyeluruh. Ketua Pokmas Hijau Sayurku, Ibu Nur Aisyah menyampaikan :

"Kami masih belum merasakan perubahan dengan adanya program ini, karena termasuk awal masih mengatur untuk pembelian nutrisi, bibit sayuran, dan kebutuhan lainnya. Disamping itu kami juga masih kesulitan untuk pemasaran hasil panen sayuran hidroponik." (Wawancara, 12 Juni 2025)

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa dua hambatan utama bagi Pokmas dalam mencapai tujuan program adalah masalah pengadaan sarana produksi dan akses pasar. Produk hasil hidroponik sulit berkembang secara ekonomi karena tidak adanya pendampingan lanjutan dan kurangnya koneksi ke rantai pemasaran.

Kondisi ini memperkuat kesimpulan bahwa tujuan utama program belum tercapai secara efektif, baik dari segi produksi, pendapatan masyarakat, maupun keberlanjutan kegiatan. Sebagaimana dinyatakan oleh Edy Sutrisno (2010), efektivitas hanya bisa diukur dari hasil yang sejalan dengan tujuan yang direncanakan. Tanpa tercapainya hasil nyata dan terukur, program hanya berjalan secara administratif namun belum memberikan dampak substantif bagi masyarakat. Dalam hal ini, ketidaksesuaian antara input program dan output yang diperoleh menunjukkan bahwa program tersebut tidak efektif dalam aspek hasil (outcome). Temuan ini juga didukung oleh penelitian Nurjariah dan Dharma (2024) yang menyatakan bahwa program ketahanan pangan akan sulit berhasil tanpa sistem pelatihan yang berkelanjutan, dukungan untuk modal dan akses pasar. Kegiatan Pokmas cenderung stagnan dan tidak menghasilkan perubahan signifikan bagi masyarakat desa jika tidak ada ekosistem yang mendukung secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Ngampelsari, terdapat sejumlah faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaan program. Faktor pendukung utama adalah alokasi anggaran yang cukup besar dari Dana Desa, minimal 20% sesuai kebijakan nasional. Dengan bantuan dana ini, pemerintah desa dapat membangun berbagai program, seperti pertanian hidroponik, peternakan, dan perikanan. Selain itu, modal sosial penting lainnya adalah komitmen awal masyarakat dan aparat desa untuk mendukung program. Ada upaya untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam menjalankan program, yang ditunjukkan dengan pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) yang terdiri dari elemen masyarakat, lembaga desa dan unsur perempuan. Meskipun belum optimal, pelaksanaan pelatihan adalah salah satu bentuk intervensi positif yang mendukung pelaksanaan program di lapangan.

Namun demikian, keberhasilan program tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Salah satu penghambat yang paling signifikan adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berpengalaman dalam mengelola usaha pangan, terutama dalam sektor perikanan dan pertanian hidroponik. Banyak anggota Pokmas tidak memahami teknis, sehingga budidaya tidak berjalan dengan baik. Selain itu, pelatihan yang diberikan hanya sekali dan tidak ada pendampingan yang berkelanjutan. Dari perspektif lingkungan, budidaya lele dan nila menghadapi banyak tantangan. Masalah seperti serangan penyakit ikan, pH air yang rendah, dan penempatan kolam yang tidak direncanakan dengan baik menyebabkan penurunan hasil panen atau bahkan gagal panen. Tujuan ekonomi program ini juga dihambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana pasca-panen serta belum terbangunnya akses pasar yang luas.

Kombinasi faktor pendukung dan penghambat ini menunjukkan bahwa meskipun Desa Ngampelsari telah berkomitmen untuk menerapkan program ketahanan pangan, keberhasilannya sangat bergantung pada peningkatan sumber daya manusia, dukungan teknis berkelanjutan, dan sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih baik di tingkat desa.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Desa Ngampelsari, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari tiga indikator utama. Pertama, pada indikator pemahaman program, ditemukan bahwa tidak semua anggota kelompok masyarakat (Pokmas) memahami secara utuh maksud, tujuan, dan teknis pelaksanaan program. Pemahaman yang lebih baik dimiliki oleh anggota yang terlibat sejak awal, sementara anggota baru cenderung mengalami kesulitan karena minimnya pelatihan lanjutan dan tidak adanya sistem pendampingan teknis yang berkelanjutan. Kedua, pada indikator tepat sasaran, meskipun proses pembentukan Pokmas telah dilakukan melalui musyawarah desa secara partisipatif, masih terdapat ketidaksesuaian antara peserta program dengan kapasitas dan komitmen yang dibutuhkan.

Banyak anggota Pokmas yang tidak aktif menjalankan program karena kesibukan atau kurangnya motivasi, sehingga mengganggu keberlanjutan kegiatan. Ketiga, pada indikator tercapainya tujuan, program belum mampu mencapai target secara optimal. Hasil panen lele masih fluktuatif dan beberapa kelompok mengalami gagal panen karena kualitas air yang buruk, pencurian, dan rendahnya kemampuan teknis. Program hidroponik yang baru dimulai juga belum menghasilkan dampak signifikan, dan pelatihan pengolahan makanan belum berkembang menjadi kegiatan usaha produktif karena tidak ditopang dengan modal dan akses pasar. Secara keseluruhan, Program Ketahanan Pangan di Desa Ngampelsari masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Efektivitas program belum maksimal, baik dalam aspek pelaksana, proses, maupun hasil. Oleh karena itu, diperlukan strategi perbaikan pada aspek pembinaan, seleksi sasaran, dan penguatan keberlanjutan program.

Untuk meningkatkan program ketahanan pangan Desa Ngampelsari, pemerintah desa perlu meningkatkan intensitas dan kesinambungan pelatihan teknis serta mendampingi pelaksanaan program secara berkala agar pemahaman anggota Pokmas merata. Proses rekrutmen anggota kelompok sebaiknya mempertimbangkan kesiapan, komitmen, dan kapasitas warga secara lebih selektif agar program tepat sasaran. Selain itu, perlu adanya penguatan kelembagaan Pokmas melalui pembinaan rutin, dukungan alat produksi, dan fasilitasi akses ke pasar. Program juga perlu dirancang dengan strategi keberlanjutan, seperti pengelolaan usaha bersama atau koperasi desa agar hasil budidaya dan pelatihan dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif yang stabil dan berdampak jangka Panjang.

### **Ucapan Terima Kasih**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Efektivitas Program Ketahanan Pangan di Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” hingga selesai. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini. Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dan Pemerintah Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dimana penulis melakukan penelitian ini, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

### **References**

- [1] BPHN, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, vol. 83, p. 3, 2012.
- [2] Kementerian Koordinator PMK, “Program Ketahanan Pangan dan Penurunan Stunting Merupakan Salah Satu Prioritas dalam RPJMN 2020–2024,” 2020. [Online]. Available: <https://www.kemendagri.go.id/program-ketahanan-pangan-dan-penurunan-stunting-merupakan-salah-satu-prioritas-dalam-rpjmn-2020>
- [3] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa*, 2021.
- [4] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*, 2021.
- [5] Kemendes PDTT RI, *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023*, 2022.
- [6] Kepmendes No. 82, *Pedoman Ketahanan Pangan di Desa*, vol. 2, pp. 1–23, 2022.
- [7] L. F. (212020100009), “Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Secara Masif di Kabupaten Sidoarjo,” *Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 2024.
- [8] R. A. Baktiono, “Ragam dan Potensi Sumber Bahan Pangan di Kabupaten Sidoarjo dalam Menopang Ketahanan Pangan Nasional,” *Narotama University Press*, 2017.
- [9] N. Masitoh, M. Rahmawati, D. A. Rahmani, and W. Wursan, “Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya,” *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, vol. 8, no. 1, pp. 1–6, 2022, doi: 10.37058/jspmm.v8i1.3861.

- [10] G. I. Ashari, "Efektivitas Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)," *Universitas Lampung*, 2022.
- [11] H. W. Sunarso, M. H. Ichsan, M. F. Asrian, and M. Ilham, "Efektivitas Program Ketahanan Pangan di Gampong Keuramat Kota Banda Aceh," *Jurnal Politik Sphere*, vol. 4, no. 1, pp. 31–44, 2023.
- [12] D. T. G. Nurjakiah and A. S. Dharma, "Efektivitas Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan," *Jurnal Kebijakan Publik*, 2024.
- [13] D. Karang, T. Candi, D. Ananda, N. Amalia, and I. Rodiyah, "Effectiveness of the Sipraja Application Program in Digital-Based Administrative Services in Karang Tanjung Candi Village," 2024.
- [14] E. Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- [15] A. Corbin and J. Strauss, *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2008.
- [16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [17] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 2nd ed. London: Sage Publications, 1994.